

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Wisnu Jabarul Hakim

NPP. 31.0987

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Keuangan Publik

Email: wisnuhakim434@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fitri Yul Dewi Marta, S.IP, M.Sii

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): the Regional Financial and Asset Management Agency of Ambon City, based on the premise that SIPD implementation has not been optimally carried out by employees/human resources in supporting the digitalization of regional financial management. Furthermore, there is a lack of information or knowledge in operating the application, which needs to be aligned with the principles of sound financial management. **Purpose:** This research aims to evaluate the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on the financial performance of the Ambon City government. The SIPD implementation is in response to Minister of Home Affairs Regulation No. 70 of 2019, which mandates regional governments to use SIPD in managing regional finances. **Method:** The research was conducted using a descriptive qualitative method with an inductive approach. The data used consists of primary and secondary data obtained through interviews and documentation collection. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using the Miles and Huberman (Sugiyono, 2016) analysis model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Purposive sampling technique was used to determine the sample of informants relevant to this study. The theoretical foundation used in this research is based on the theory of Laudon and Laudon, encompassing four dimensions: organization, management, technology, and expertise. **Result:** The research results indicate that Ambon City has complied with the Ministry of Home Affairs' instructions regarding the implementation of SIPD; however, the implementation has not been optimal. The challenges faced include limited human resource capabilities, the imperfection of the application which is still under development, and limited information. **Conclusion:** Efforts made include the socialization of the SIPD application and the utilization of the FMIS application as an alternative. It is recommended to enhance technical guidance, support from the Ministry of Home Affairs, and improvements to the SIPD application to ensure its optimal functionality.

Keywords: : Information System, Financial Management, Financial performance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon dengan dasar penerapan SIPD belum optimal dijalankan oleh pegawai/SDM dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah kemudian adanya keterbatasan informasi atau pengetahuan dalam menjalankan aplikasi tersebut yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kinerja keuangan daerah di Kota Ambon. Implementasi SIPD ini dilakukan sebagai respon terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD dalam mengelola keuangan

daerah. **Metode:** Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis sesuai model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016) yang mencakup teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel informan yang relevan dengan penelitian ini. Landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori menurut Laudon dan Laudon dengan 4 dimensi, yaitu organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Ambon telah mematuhi instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi SIPD, namun pelaksanaannya belum maksimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan, dan keterbatasan informasi. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan termasuk sosialisasi aplikasi SIPD dan pemanfaatan aplikasi FMIS sebagai alternatif. Disarankan untuk meningkatkan Bimbingan Teknis (Bimtek), pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri, serta penyempurnaan aplikasi SIPD agar fungsinya lebih optimal. **Kata kunci:** Sistem Informasi, Pengelolaan Keuangan, Kinerja Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan inti dari otonomi daerah, di mana pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, termasuk desentralisasi fiskal. Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan sumber kekayaan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Desentralisasi fiskal memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur keuangannya secara optimal, meningkatkan kinerja keuangan, dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur seluruh proses keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab untuk menjaga rasa keadilan dan kepatuhan pada peraturan.

Kemajuan teknologi di era globalisasi menuntut birokrasi untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berperan penting dalam mengelola data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait anggaran dan keuangan. SIKD membantu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data keuangan dengan prinsip tata kelola yang baik. Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2019 dan bertujuan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya. SIPD diharapkan dapat memastikan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pendataan serta membantu dalam pengambilan keputusan tentang alokasi anggaran dan program pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Ambon mulai melaksanakan kewajiban penggunaan SIPD dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sejak tahun 2021. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti keterlambatan penginputan data akibat masalah jaringan

dan kurangnya pemahaman aparaturnya terkait penggunaan SIPD. Akibatnya, sistem pengelolaan keuangan kembali menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada tahun 2021 dan 2022, dan kemudian beralih ke Financial Management Information System (FMIS) pada tahun 2023 karena SIPD belum sepenuhnya siap dalam tahap penatausahaan dan pelaporan, masih berkuat pada tahap perencanaan dan penganggaran. Secara keseluruhan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan, serta memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik melalui dukungan teknologi informasi yang efektif seperti SIPD dan SIKD.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan peralihannya ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) di Kota Ambon menunjukkan beberapa kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. SIPD awalnya dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat pemerintah daerah dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Sistem ini membantu dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan, namun sering terkendala oleh proses manual dan integrasi data yang kurang efisien.

Sebaliknya, SIPD-RI dirancang dengan teknologi yang lebih canggih, memungkinkan integrasi data lintas sektor dan wilayah secara real-time. Hal ini memungkinkan data diperbarui dan diakses instan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. SIPD-RI juga menambahkan fitur-fitur baru yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti dashboard analitik komprehensif untuk pemantauan kinerja secara langsung. Namun, dalam implementasinya, peneliti menemukan beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan SIPD dan SIPD-RI. Beberapa di antaranya adalah jaringan server yang tidak mendukung pelayanan, proses penginputan data yang sering mengalami keterlambatan karena kendala jaringan, serta penginputan data yang masih dilakukan secara manual, mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem.

Masalah ini dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah daerah karena penggunaan sistem yang belum optimal menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. SIPD dan SIPD-RI berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan fitur pemantauan dan pelaporan real-time, analisis kinerja, serta transparansi dan akuntabilitas. SIPD memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan keuangan daerah secara real-time, menyajikan data keuangan yang akurat dan tepat waktu, dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SIPD memungkinkan evaluasi anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Sistem ini juga membantu menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi informasi keuangan dengan menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, SIPD membantu dalam perencanaan anggaran dengan menyediakan informasi historis dan tren keuangan yang relevan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan keuangan dan alokasi sumber daya. SIPD juga berperan dalam pengelolaan risiko dengan membantu identifikasi potensi risiko keuangan dan pengembangan strategi pengelolaannya. Meskipun SIPD-RI menawarkan banyak keunggulan, kesenjangan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi pengguna untuk memastikan sistem ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah studi sebelumnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Studi-studi tersebut berfungsi sebagai sumber informasi, panduan, pertimbangan, dan arahan yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan gambaran yang beragam terkait implementasi dan efektivitasnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Ganjar Pamungkas (2022) dalam penelitiannya menganalisis implementasi SIPD di pemerintahan DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi SIPD di kedua wilayah tersebut belum maksimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muh. Zaky Harahap (2022) yang mengevaluasi pemanfaatan SIPD untuk pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan, Sumatera Utara. Harahap menyatakan bahwa penggunaan SIPD belum efektif, sehingga tujuan dari penggunaannya belum tercapai, menyoroti tantangan yang sama dalam implementasi SIPD.

Penelitian lainnya oleh Wawan Giri Santoso (2022) mengamati implementasi SIPD dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Subang. Hasil penelitiannya mengungkapkan adanya kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemahaman SIPD, yang mengakibatkan hambatan dalam implementasinya. Annisa (2021) juga menemukan bahwa penerapan SIPD di Badan Keuangan Kota Bukittinggi belum efektif, disebabkan oleh kurangnya ketelitian pengguna dalam menginput data, jaringan yang tidak stabil, dan komputer yang tidak memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor teknis dan SDM merupakan kendala utama dalam penerapan SIPD. Lebih lanjut, Asma Latifa (2021) mengevaluasi efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh. Ia menemukan bahwa implementasi SIPD telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya digunakan oleh semua pihak terkait. Cintya Infantrina Riady (2021) dalam penelitiannya di Kota Tasikmalaya menemukan bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masih diproses secara manual, menyebabkan ketidaksesuaian data antara surat tugas dan SPPD. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi dan otomatisasi dalam SIPD masih perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahan data.

Chinda Aqni Adisi (2022) meneliti efektivitas program SIPD di Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu dan menemukan bahwa meskipun program SIPD cukup efektif, sering terjadi error jaringan dan ketidakmampuan membuat template yang dibutuhkan, sehingga BPKAD masih harus menggunakan aplikasi pendamping. Penelitian Muhammad Rizal Irwan (2022) mengenai penerapan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa meskipun menghadapi beberapa hambatan, penerapan SIPD dapat berjalan dengan lancar setelah menangani kendala yang ada. Kemudian Tumija (2022) meneliti terkait Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan hasil penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan. Namun, terdapat kendala pada dimensi sumber daya, khususnya indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), di mana meskipun menu yang diperlukan sudah ada, aksesnya belum dapat dilakukan. Hambatan-hambatan dalam penerapan SIPD di Kota Semarang meliputi: a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat yang belum optimal; b) kekuatan server yang tersedia masih kurang memadai; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait Aklap. Dewi (2023) mengenai pengaruh implementasi SIPD terhadap kinerja pengelola keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi menunjukkan bahwa implementasi SIPD berkontribusi sebesar 45,1% terhadap kinerja, namun masih belum maksimal dengan sisa 54,9%. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun SIPD memberikan kontribusi yang signifikan, masih ada ruang untuk peningkatan agar kinerja pengelola keuangan dapat

lebih optimal.

Keseluruhan penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi SIPD di berbagai daerah di Indonesia. Masalah yang muncul berkisar dari kurangnya kesiapan SDM, ketidakstabilan jaringan, hingga kurangnya ketelitian dalam penginputan data. Meskipun demikian, beberapa daerah menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi kendala tersebut dan berhasil mengimplementasikan SIPD dengan baik. Hasil-hasil penelitian ini menginspirasi peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut tentang solusi praktis yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan SIPD di seluruh Indonesia. Terinspirasi oleh penelitian sebelumnya, peneliti dapat fokus pada pengembangan strategi pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur teknologi, dan penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan SIPD secara optimal, sehingga dapat membantu mewujudkan good governance dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Ambon. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, pemerintah daerah diwajibkan menggunakan SIPD untuk mengelola keuangan daerah secara digital. Namun, studi ini menemukan bahwa penerapan SIPD di Kota Ambon belum optimal, terutama karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan ketidaksempurnaan aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode induktif digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kota Ambon telah mematuhi instruksi Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan SIPD masih mengalami hambatan signifikan. Solusi yang disarankan termasuk peningkatan sosialisasi aplikasi SIPD, penggunaan aplikasi FMIS sebagai alternatif, serta peningkatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menyoroti perlunya peningkatan kapasitas SDM dan penyempurnaan teknologi aplikasi untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian bertujuan memperoleh fakta dan menganalisis data secara sistematis. Silalahi (2015: 15) menyatakan bahwa metode penelitian adalah prosedur terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis berdasarkan fakta yang tepat, sementara pendekatan induktif berawal dari fakta yang terjadi di lapangan dan dianalisis untuk dikaitkan dengan teori hingga mencapai kesimpulan. Operasional konsep dalam penelitian mengubah konsep abstrak menjadi definisi yang dapat diukur, penting untuk menguraikan dan mengukur variabel penelitian. Menurut Laudon dan Laudon (2017: 17-18), sistem informasi manajemen mencakup aspek organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian. Peneliti menggunakan konsep ini dalam penelitian berjudul "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku."

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Menurut

Sugiyono (2016: 194), data primer diperoleh langsung melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, literatur, artikel, dan jurnal untuk mendukung informasi dari data primer. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan penelitian. Moleong (2013: 132) menyebut informan sebagai individu yang memberikan informasi situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung objek penelitian (Arikunto, 2013: 199), sementara Indrawan dan Yuniawati (2014: 136) menekankan etika observasi. Analisis data adalah proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan, penyeleksian, dan pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk pemecahan masalah. Sugiyono (2016: 244) menjelaskan bahwa analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data melibatkan merangkum dan memilih data utama, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, dan kesimpulan diambil berdasarkan data yang konsisten dengan fakta lapangan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2016: 246).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Ambon

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Ambon, serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi tersebut. Penggunaan SIPD juga membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan daerah secara real-time, serta memberikan informasi yang komprehensif mengenai aspek keuangan daerah. Meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya, upaya pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan penggunaan SIPD menunjukkan komitmen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi SIPD yang berhasil akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan mendukung terciptanya pemerintahan yang berbasis elektronik, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan utama dalam implementasi SIPD meliputi empat dimensi utama, yaitu organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian, berdasarkan teori sistem informasi manajemen menurut Laudon dan Laudon (2017: 17-18).

- a. **Dimensi organisasi**, SIPD berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah dengan mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam kegiatan penginputan data keuangan. Kebijakan yang diambil, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Namun, kendala dalam pelaksanaan SIPD menyebabkan peralihan sementara ke SIMDA dan FMIS. Di tahun 2024, seluruh proses perencanaan dan penganggaran di Kota Ambon kembali mengacu pada SIPD. SIPD telah membantu dalam pengelolaan data keuangan dengan lebih baik dan efisien, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam keterlibatan semua perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Budaya organisasi yang mendukung penggunaan SIPD juga penting untuk memastikan bahwa proses digitalisasi berjalan lancar.
- b. **Dimensi manajemen** menekankan pada pentingnya peran manajer dalam menggunakan informasi dari SIPD untuk pengambilan keputusan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). SIPD menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mendukung proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Ambon menunjukkan bahwa penggunaan SIPD dalam pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban telah

memberikan informasi yang komprehensif dan real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

- c. **Dimensi teknologi** mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan infrastruktur teknologi lainnya yang digunakan dalam pengelolaan informasi di dalam organisasi. SIPD yang berbasis web memerlukan jaringan internet yang stabil dan kapasitas server yang memadai. Namun, kendala jaringan dan kapasitas server sering menyebabkan gangguan dalam pengoperasian SIPD, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Ambon. Kendala ini mengakibatkan data yang telah dimasukkan terhapus dan perlu dimasukkan kembali, serta menghambat penginputan data pada waktu-waktu tertentu. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, monitor, router, dan printer, sangat penting untuk mendukung penggunaan SIPD dengan efektif.
- d. **Dimensi keahlian** menyoroti pentingnya kemampuan dan pengetahuan individu dalam mengelola dan menggunakan sistem informasi. Keahlian dalam teknologi informasi, proses bisnis, analisis data, dan keamanan informasi menjadi kunci dalam implementasi SIPD. Kepala BPKAD Kota Ambon menyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan SIPD telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah. Namun, kendala dalam penginputan data, seperti SPD, SPP, dan SP2D, masih memerlukan peningkatan pemahaman dan keterampilan pengguna SIPD.

Dalam analisis fokus penelitian berdasarkan perspektif teoritis, implementasi SIPD di Kota Ambon menunjukkan bahwa organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian saling berinteraksi dan saling mendukung untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Ambon terus berupaya mengatasi kendala dalam implementasi SIPD dengan melakukan perbaikan infrastruktur teknologi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi. SIPD telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini.

3.2. Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Ambon

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon berjalan relatif lancar, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mahir dalam mengoperasikan SIPD. Dari total 56 pegawai, hanya 26 yang menguasai SIPD dengan baik, sementara 30 pegawai lainnya masih dalam tahap belajar. Hal ini mengakibatkan pegawai yang mahir harus melakukan pekerjaan ganda, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam penyelesaian tugas.

Selain itu, keterbatasan informasi dalam SIPD juga menjadi kendala signifikan. Tidak semua pihak yang berwenang atau terlibat dalam proses penggunaan SIPD memiliki akses penuh terhadap informasi yang diperlukan. Hal ini menghambat koordinasi antarstaf dan antarbagian, karena ketidakpahaman terhadap penggunaan SIPD memperburuk distribusi informasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas dan distribusi informasi yang merata bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan SIPD.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah seringnya aplikasi SIPD mengalami error, terutama karena penggunaan aplikasi ini dilakukan secara bersamaan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Indonesia selama jam kerja. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Ambon mengungkapkan bahwa penggunaan simultan ini sering menyebabkan sistem overload, yang menghambat proses kerja. Oleh karena itu, penting untuk menentukan waktu khusus untuk

penginputan data guna menghindari error pada aplikasi.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam beberapa aspek implementasi SIPD. Pertama, BPKAD Kota Ambon perlu meningkatkan kapasitas dan keahlian SDM melalui pelatihan intensif agar lebih banyak pegawai yang mampu mengoperasikan SIPD dengan efektif. Kedua, akses informasi perlu ditingkatkan dan didistribusikan secara merata untuk mendukung koordinasi yang lebih baik antarstaf dan antarbagian. Ketiga, pengembangan aplikasi yang lebih tahan terhadap penggunaan simultan oleh banyak perangkat diperlukan untuk mengurangi frekuensi error sistem. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, SIPD dapat lebih optimal digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Ambon, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan.

3.3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Ambon

Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan menggunakan SIPD di BPKAD Kota Ambon, telah diambil berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah penggunaan aplikasi FMIS sebagai pendukung. Kepala BPKAD Kota Ambon menyatakan bahwa meskipun SIPD telah digunakan, kendala teknis tetap ada dan disebabkan oleh kekurangan dalam aplikasi itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan FMIS diharapkan dapat membantu mengatasi masalah ini sementara perbaikan SIPD sedang berlangsung. Ini menunjukkan pentingnya keputusan cepat dan tepat dari seorang pemimpin organisasi dalam menghadapi masalah operasional.

Selain itu, BPKAD Kota Ambon juga fokus pada penyempurnaan aplikasi SIPD. Kepala Bidang Anggaran menyebutkan bahwa telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan fitur-fitur baru yang meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan informasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama dengan pemerintah pusat menunjukkan komitmen BPKAD dalam meningkatkan kemudahan akses dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif.

Upaya lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan terkait pengoperasian SIPD untuk mengatasi keterbatasan SDM. Kepala BPKAD menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah aktif menyelenggarakan bimtek dan pelatihan bagi administrator dan operator SIPD, terutama staf BPKAD. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar seluruh staf BPKAD mampu mengoperasikan SIPD dengan baik saat aplikasi tersebut siap digunakan kembali. Sekretaris BPKAD menambahkan bahwa pelatihan ini juga melibatkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, yang diadakan pada Februari 2023 dan Maret 2024 di Ambon, dengan peserta dari berbagai SKPD. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu peserta memahami dan menguasai SIPD agar implementasinya berjalan lancar.

Kesimpulan dari berbagai upaya ini adalah bahwa BPKAD Kota Ambon menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi hambatan penggunaan SIPD melalui berbagai langkah strategis. Penggunaan aplikasi FMIS sebagai pendukung sementara menunjukkan fleksibilitas dalam mencari solusi alternatif. Penyempurnaan SIPD melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan pengembangan fitur-fitur baru mencerminkan upaya proaktif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja. Selain itu, penyelenggaraan bimtek dan pelatihan secara berkala memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam pengoperasian SIPD memiliki keahlian yang diperlukan.

Semua upaya ini menunjukkan dedikasi BPKAD Kota Ambon terhadap peningkatan layanan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengatasi kendala teknis, meningkatkan akses informasi, dan mengembangkan kapasitas SDM, diharapkan SIPD dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif.

Pendekatan holistik ini memastikan bahwa setiap aspek dari kendala yang dihadapi ditangani dengan baik, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Pemerintah Kota Ambon dan penelitian Tumija (2023) mengenai penerapan SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dalam temuan utama mereka. Kedua penelitian menyoroti pentingnya SIPD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, namun mereka juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama implementasi.

- a. **Dimensi Organisasi dan Manajemen:** Penelitian peneliti di Kota Ambon menemukan bahwa SIPD berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah. Namun, kendala dalam pelaksanaan SIPD menyebabkan beberapa kali peralihan sementara ke sistem lain seperti SIMDA dan FMIS. Pada tahun 2024, Kota Ambon berencana untuk kembali sepenuhnya menggunakan SIPD. SIPD telah membantu dalam pengelolaan data keuangan dengan lebih efisien, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam keterlibatan semua perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Budaya organisasi yang mendukung penggunaan SIPD juga penting untuk memastikan bahwa proses digitalisasi berjalan lancar. Sementara itu, penelitian Tumija (2023) di Kota Semarang menekankan pada pentingnya komunikasi dalam penerapan SIPD. BPKAD Kota Semarang melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi, serta workshop aplikasi SIPD, yang didukung oleh kebijakan Permendagri 70/2019. Mereka berkomitmen untuk menggunakan SIPD dari tahap perencanaan hingga pelaporan, meskipun di awal penerapannya mengalami kendala sehingga perlu menggunakan aplikasi pendukung. Konsistensi komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah teknis yang muncul.
- b. **Dimensi Teknologi:** Penelitian di Kota Ambon menyoroti bahwa kendala teknologi seperti jaringan internet yang tidak stabil dan kapasitas server yang tidak memadai sering menyebabkan gangguan dalam pengoperasian SIPD. Hal ini mengakibatkan data yang telah dimasukkan terhapus dan perlu dimasukkan kembali, serta menghambat penginputan data pada waktu-waktu tertentu. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, monitor, router, dan printer, sangat penting untuk mendukung penggunaan SIPD dengan efektif. Di Kota Semarang, kendala teknologi juga menjadi masalah utama. Penelitian Tumija (2023) menemukan bahwa server pusat sering mengalami error system karena tidak mampu menangani penginputan data secara bersamaan oleh semua OPD. Selain itu, fitur-fitur dalam SIPD belum sepenuhnya optimal, menyebabkan kesulitan dalam akuntansi dan pelaporan. Untuk mengatasi ini, BPKAD Kota Semarang terus melakukan diklat dan pelatihan dengan Kementerian Dalam Negeri serta membentuk tim pendamping implementasi SIPD.
- c. **Dimensi Sumber Daya Manusia:** Penelitian di Kota Ambon menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang mahir dalam mengoperasikan SIPD merupakan salah satu kendala utama. Dari 56 pegawai, hanya 26 yang menguasai SIPD dengan baik. Upaya untuk mengatasi ini termasuk penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan terkait pengoperasian SIPD untuk meningkatkan kemampuan SDM. Sedangkan di Kota Semarang, penelitian Tumija (2023) menemukan bahwa meskipun jumlah SDM yang menangani SIPD sudah memadai, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat dan pelatihan yang belum optimal menjadi kendala dalam implementasi SIPD. Pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif kepada karyawan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.

d. Upaya Mengatasi Kendala: Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan keuangan menggunakan SIPD di BPKAD Kota Ambon, telah diambil berbagai langkah strategis seperti penggunaan aplikasi FMIS sebagai pendukung dan penyempurnaan aplikasi SIPD melalui kerjasama dengan pemerintah pusat. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan secara berkala diadakan untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Di Kota Semarang, strategi yang diambil termasuk peningkatan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pengembangan fasilitas pendukung seperti server dan jaringan, serta pemberian pelatihan dan insentif kepada karyawan. Upaya ini menunjukkan komitmen BPKAD Kota Semarang dalam mengatasi hambatan teknis dan meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung implementasi SIPD yang lebih efektif.

Kedua penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kota Ambon dan Kota Semarang menghadapi tantangan yang serupa, terutama dalam hal teknologi dan sumber daya manusia. Namun, pendekatan yang diambil oleh kedua kota untuk mengatasi masalah ini berbeda. Kota Ambon lebih menekankan pada peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan SDM, sementara Kota Semarang fokus pada peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat serta pengembangan fasilitas pendukung. Kedua pendekatan ini mencerminkan upaya proaktif dari masing-masing kota untuk mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Pemerintah Kota Ambon telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Penggunaan SIPD memfasilitasi pemantauan dan evaluasi keuangan secara real-time, serta menyediakan informasi yang komprehensif. Namun, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya, termasuk tantangan dalam dimensi organisasi, manajemen, teknologi, dan keahlian. Untuk mengatasi kendala ini, Pemerintah Kota Ambon telah melakukan berbagai upaya, seperti menggunakan aplikasi FMIS sementara, menyempurnakan fitur SIPD, dan memberikan pelatihan intensif kepada pegawai. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dengan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, diharapkan SIPD dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini dibatasi oleh ketersediaan data yang terbatas dan keterbatasan waktu dalam mengumpulkan informasi. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada implementasi SIPD di Pemerintah Kota Ambon, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penelitian dapat memperluas cakupan dengan mengkaji implementasi SIPD di berbagai daerah untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari penggunaan SIPD terhadap kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah difokuskan pada pengembangan model pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam mengoperasikan SIPD. Analisis terhadap peningkatan infrastruktur teknologi dan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan aplikasi pendukung menjadi fokus penelitian mendatang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak kepala BPKAD Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Indrawan dan Yaniawati. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Laudon, Kenneth C dan Laudon, P Jane. (2017). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- _____. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C. JURNAL DAN SKRIPSI

- Adisi, Chinda Aqhni, & Abdul Sadad. (2022). "Efektivitas program sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 3, 150-164, Universitas Riau, Pekanbaru. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/581>
- Annisa, A. (2021). "Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi". (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS). <http://scholar.unand.ac.id/95937/>
- Dewi. (2020). "Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 10, No. 9, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13178>
- Harahap, M. Z. (2022). "Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara" (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/9265/>

- Irwan, M. R. (2022). “*Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara*”. (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/7455/>
- Pamungkas, Ganjar (2022). “*Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*” (Studi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Barat). Yogyakarta. Universita Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209397>
- Santoso, W. G. (2022). “*Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang*”. (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS). <https://repository.unpas.ac.id/56422/>
- Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). “*Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*”. *Jurnal Media Birokrasi*, 79-91. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/3389>

